

IMPLEMENTATION OF THE RICE FARMING BUSINESS INSURANCE PROGRAM (AOTP) IN JUNJUNG SIRIH DISTRICT, SOLOK REGENCY

Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok

Luthfi Fakhruzi ^{1a(*)} Rizki Syafril ^{2b}

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

^a*lupifahruzi@gmail.com*

^b*rizkisyafri@fis.unp.ac.id*

(*) Corresponding Author

lupifahruzi@gmail.com

How to Cite: Luthfi Fakhruzi. (2025). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok doi: 10.36526/js.v3i2.5025

Received : 20-12-2024 Revised : 29-01-2025 Accepted : 06-02-2025 Keywords: Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)	Abstract Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi besar untuk mendukung petani, beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman petani, dan koordinasi yang belum optimal antar pihak pelaksana masih menjadi hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan agar dilakukan peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi pelaksana, serta penguatan koordinasi antar semua pihak terkait. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi petani agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal. Dengan demikian, diharapkan program AOTP dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.
--	--

PENDAHULUAN

Pemerintah meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) pada 2015 untuk melindungi petani dari gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Kabupaten Solok, sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Barat, telah mengikuti program ini sejak 2017 dengan luas sawah yang diasuransikan mencapai 3.077,84 hektare

Tabel 1 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Solok

No	Tahun	Jumlah Kelompok Tani
1.	2019	1.585
2.	2020	1.556
3.	2021	1.604
4.	2022	1.604
5.	2023	1.701

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok

Berdasarkan pada tabel di atas dilihat pada tahun 2019 terdapat 1.585 orang mengalami penurunan pada tahun 2020 terdapat 1.556 orang dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan jumlah kelompok tani sebanyak 1.701 pada tahun 2023. Selanjutnya terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Solok yang menggunakan AOTP. 7 kecamatan lainnya yang tidak menggunakan AOTP

dikarenakan di kecamatan tersebut beriklim dingin sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian padi. Peneliti memfokuskan kepada Kecamatan Junjung Sirih dikarenakan di Kecamatan tersebut yang memiliki jumlah pengguna AUTP paling sedikit daripada kecamatan lainnya yaitu hanya berjumlah 10. Jumlah kelompok tani yang menggunakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih di Kabupaten Solok masih minim, hal ini di sampaikan oleh oleh Ibu Zubaidar selaku ketua kelompok tani:

Kabupaten Solok memiliki banyak kelompok tani yang berperan dalam pembangunan pertanian. Dari 2019 hingga 2023, jumlah kelompok tani meningkat dari 1.585 menjadi 1.701. Namun, hanya tujuh kecamatan yang memanfaatkan AUTP, sementara tujuh lainnya tidak karena kondisi iklim yang kurang mendukung. Kecamatan Junjung Sirih memiliki jumlah peserta AUTP paling sedikit, hanya 10 kelompok tani.

Beberapa kendala dalam implementasi AUTP di Kecamatan Junjung Sirih meliputi kurangnya sosialisasi, minimnya pengetahuan petani, prosedur pendaftaran yang rumit, serta kurangnya motivasi petani untuk ikut serta. Wawancara dengan petani dan pejabat setempat menunjukkan bahwa banyak petani tidak mengetahui adanya program ini atau enggan mendaftar karena proses yang berbelit. Akibatnya, pelaksanaan AUTP di kecamatan ini belum optimal.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. metode deskriptif menurut Nazir (dalam Prastowo, 2016) adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa. Dalam melakukan penelitian kualitatif, terdapat informan penelitian. Untuk informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Adapun jumlah informan dalam penelitian berjumlah 6 orang yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, penanggung jawab program AUTP dan Kelompok tani di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Selain itu, peneliti akan menggunakan dua macam jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kali. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari literatur-literatur dan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini misalnya foto hasil dokumentasi wawancara dengan informan, dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan program asuransi usaha tani padi di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, pelaksanaan AUTP dimulai beberapa tahun setelah program ini diperkenalkan secara nasional. Kecamatan ini dipilih sebagai salah satu lokasi implementasi program karena wilayahnya memiliki potensi besar dalam budidaya padi, namun juga rentan terhadap risiko yang dapat mengancam keberlanjutan usaha tani. Faktor seperti curah hujan yang tinggi, ancaman banjir, dan serangan hama membuat petani di kawasan ini sering menghadapi kerugian besar saat panen gagal. Untuk mengurangi kerugian petani akibat risiko-risiko tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menginisiasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini dirancang sebagai upaya perlindungan finansial bagi petani dengan memberikan klaim ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan panen. Program AUTP menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan usaha tani padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, merupakan salah

satu wilayah yang potensial dalam pengembangan usaha tani padi. Program yang ada pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu:

1. Pelindungan Petani

Pertanian merupakan sektor yang menopang perekonomian termasuk di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Sumatera Barat. Risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas tani, tetapi juga pada kesejahteraan petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan skema subsidi premi yang terjangkau. Dalam program ini, petani yang terdaftar dan mengalami gagal panen berhak menerima klaim ganti rugi, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus mengalami kerugian yang signifikan.

2. Ganti rugi

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, dengan usaha tani padi sebagai komoditas utama. Namun, petani di wilayah ini kerap menghadapi berbagai risiko yang mengancam hasil panen, seperti bencana alam, serangan hama, dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini seringkali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan berdampak pada keberlanjutan usaha tani. Sebagai upaya untuk melindungi petani dari dampak risiko gagal panen, pemerintah memperkenalkan Program Asuransi Usaha Tani Padi. Petani perlu melampirkan bukti kerugian seperti data kerusakan lahan dan hasil verifikasi lapangan. Mekanisme penggantian dengan mendokumentasikan kerugian dan melaporkannya tepat waktu. Selain itu, bekerja sama dengan penyuluh untuk memverifikasi kerusakan di lapangan. Pernah ada beberapa kasus klaim ditolak karena petani tidak melaporkan kerugian dalam waktu yang ditentukan atau tidak melengkapi dokumen yang diminta, seperti foto kerusakan lahan. Selain itu, tingkat kerusakan mencapai minimal 75% dari total lahan. Setiap gagal panen yang dialami oleh masyarakat harus melakukan pelaporan kerugian hingga pengajuan klaim ke pihak asuransi. Akan tetapi kendala utama adalah kurangnya pemahaman sebagian petani terhadap persyaratan klaim, seperti bukti kerusakan yang harus didokumentasikan. Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, telah memberikan kontribusi positif dalam melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. Berikut ini tabel daftar petani yang mengalami gagal panen

3. Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam kesuksesan implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Meskipun program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada petani, keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan partisipasi petani dalam menjalani setiap tahap program, mulai dari pendaftaran, pembayaran premi, hingga pengajuan klaim ganti rugi. Di Kecamatan Junjung Sirih, banyak petani yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur dari program AUTP. Kenedy Hamzah, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, beliau mengatakan: Bentuk pendidikan yang dilakukan dalam Program AUTP melalui penyuluh pertanian dan kelompok tani dengan memberikan informasi tentang manfaat asuransi, cara mendaftar, serta prosedur klaim ganti rugi. Tantangan yang dihadapi adalah tingkat pemahaman petani yang masih rendah, terutama yang terkait dengan administrasi klaim dan proses pelaporan kerugian. Berikut ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok kepada masyarakat terkait dengan Program AUTP. Di Kecamatan Junjung Sirih, sering mengadakan pertemuan dengan petani untuk menjelaskan secara rinci manfaat AUTP dan cara pengajuan klaim.

4. Bantuan Premi

Salah satu fitur utama yang menarik dari program ini adalah bantuan premi yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan premi ini bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung petani dalam mengikuti program asuransi, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses perlindungan finansial bagi usaha taninya. Di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten

Solok, bantuan premi ini telah menjadi salah satu faktor pendorong utama yang meningkatkan partisipasi petani dalam Program AUTP.

Dengan bantuan ini, petani hanya perlu membayar sebagian kecil dari total premi asuransi, sementara sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat atau daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi petani, khususnya yang memiliki keterbatasan finansial, untuk tetap mendapatkan perlindungan dari potensi kerugian besar akibat gagal panen. Dengan demikian pemerintah telah membuat standar kebijakan dalam program AUTP. Standar kebijakan mencakup aturan teknis dan administratif seperti mekanisme pendaftaran, besaran subsidi premi, hingga prosedur pengajuan klaim. Selain itu, ada aturan mengenai luasan lahan minimal yang diasuransikan, yaitu 1 hektare. Mekanisme bantuan premi dalam program AUTP tidak hanya dirancang untuk meringankan beban ekonomi petani, tetapi juga untuk mendorong kesadaran mereka tentang pentingnya asuransi sebagai bagian dari pengelolaan risiko pertanian. Selain itu, bantuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan keberlanjutan usaha tani di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Junjung Sirih. Di Kecamatan Junjung Sirih, mekanisme bantuan premi dilakukan dengan cara pemerintah menanggung sekitar 80% dari total premi, sehingga petani hanya perlu membayar sisanya. Bantuan premi ini sangat bermanfaat karena tanpa subsidi, banyak petani yang mungkin tidak mampu mengikuti program ini. Di kelompok tani kami, sebagian besar anggota merasa terbantu karena mereka hanya perlu membayar premi dalam jumlah kecil, sementara risiko kerugian besar bisa diminimalisir. Wawancara dengan Titin Sudarsih selaku Peserta Program AUTP.

Dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi, bantuan premi merupakan salah satu komponen utama yang dirancang untuk meringankan beban biaya bagi petani yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Pemerintah pusat memberikan subsidi premi sebesar 80%, yang secara signifikan meringankan beban biaya petani. Dengan mekanisme ini, petani hanya perlu membayar 20% dari total premi, sehingga program ini dapat diakses oleh berbagai lapisan petani, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mendukung pengelolaan administrasi dan sosialisasi program. Kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pihak asuransi bekerja sama untuk memastikan bantuan premi ini tepat sasaran dan mudah diakses. Proses pembayaran dilakukan secara kolektif melalui kelompok tani, sehingga mengurangi hambatan administratif bagi petani. Subsidi premi ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi petani di Kecamatan Junjung Sirih. Banyak petani yang awalnya enggan untuk mengikuti program asuransi menjadi tertarik setelah memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan.

Pembahasan

Di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, implementasi Program AUTP menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan para petani. Dengan luasnya wilayah pertanian padi di kecamatan ini, pelaksanaan program AUTP tidak hanya bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian finansial akibat gagal panen, tetapi juga untuk menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta pihak penyedia asuransi. Dengan demikian, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, implementasi program ini menjadi ujian nyata terhadap sejauh mana kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat diterapkan secara efektif di lapangan untuk melindungi petani dari risiko gagal panen. Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai keberhasilan implementasi suatu program. Teori ini mengidentifikasi enam variabel kunci yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam kebijakan publik, standar dan tujuan merupakan fondasi penting yang menjadi acuan keberhasilan suatu program. Standar kebijakan mencakup pedoman operasional, prosedur, serta kriteria pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Sementara itu, tujuan kebijakan menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui implementasi program tersebut. Pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), standar dan tujuan kebijakan dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada petani dari risiko gagal panen akibat faktor-faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, atau serangan hama.

Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, didasarkan pada standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memberikan perlindungan finansial bagi petani padi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko kerugian finansial yang dialami petani akibat gagal panen, serta menjaga keberlanjutan produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Dengan mekanisme pemberian subsidi premi yang mencapai 80% dari total biaya premi, petani hanya perlu membayar 20% sebagai kontribusi mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijangkau oleh petani dengan berbagai kondisi ekonomi. Standar kebijakan mencakup kriteria peserta, prosedur pendaftaran, besaran premi, serta mekanisme klaim yang harus dilakukan petani saat mengalami gagal panen.

Selain itu, tujuan kebijakan ini tidak hanya fokus pada perlindungan petani dari risiko usaha tani, tetapi juga pada penguatan sektor pertanian secara keseluruhan. Dengan adanya bantuan asuransi, diharapkan para petani dapat terus meningkatkan hasil produksi mereka tanpa khawatir tentang dampak kerugian besar akibat faktor-faktor eksternal yang tidak terduga. Tujuan lainnya adalah memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, serta membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya asuransi pertanian bagi petani.

Di Kecamatan Junjung Sirih, kebijakan ini telah berhasil menjangkau banyak petani yang tergabung dalam kelompok tani. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman petani terhadap manfaat jangka panjang dari asuransi serta prosedur klaim yang dianggap rumit. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada petani sangat diperlukan. Meskipun demikian, program ini memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas ekonomi petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, aspek sumber daya memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur yang harus tersedia secara memadai. Ketiganya menjadi faktor penentu dalam mendukung petani agar dapat mengakses dan memanfaatkan program asuransi dengan optimal.

a. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dalam Program AUTP sangat penting karena menyangkut pembiayaan asuransi bagi petani. Pemerintah telah menyediakan subsidi sebesar 80% dari total premi yang harus dibayar petani, yang memungkinkan petani dengan berbagai tingkat pendapatan dapat berpartisipasi dalam program ini. Namun, meskipun adanya subsidi, tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan dana yang cukup untuk memastikan keberlanjutan program di masa depan. Terutama di tingkat kabupaten, pengalokasian dana untuk subsidi premi harus dikelola dengan baik agar dapat mencakup seluruh petani yang memenuhi syarat. Selain itu, sistem pencairan klaim harus berjalan lancar dan tepat waktu, agar petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen bisa segera mendapatkan ganti rugi dan kembali melanjutkan usaha tani mereka.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Program AUTP meliputi penyuluh pertanian, petugas dinas pertanian, kelompok tani, dan tenaga administrasi yang mengelola

pendaftaran serta klaim asuransi. Penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mensosialisasikan manfaat dan prosedur program kepada petani, serta mendampingi petani dalam proses klaim. Meskipun sudah ada sejumlah penyuluh pertanian di Kecamatan Junjung Sirih, jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah petani yang ada.

Keterbatasan jumlah penyuluh ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh petani memahami dan terdaftar dalam program ini. Selain itu, petugas dinas pertanian dan kelompok tani juga memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran administrasi program. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaksana program sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada petani.

c. Sumber Daya Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci utama dalam kelancaran implementasi Program AUTP. Infrastruktur yang dimaksud meliputi fasilitas untuk pendaftaran petani, mekanisme pengumpulan premi, serta sistem untuk verifikasi dan klaim asuransi. Di Kecamatan Junjung Sirih, beberapa petani berada di daerah yang cukup terpencil, sehingga akses ke pusat informasi atau layanan administrasi masih terbatas. Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung proses pendaftaran dan klaim secara lebih efisien. Selain itu, kantor-kantor dinas terkait yang menangani program ini juga perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses petani dalam mengurus segala kebutuhan administrasi terkait asuransi.

Meskipun sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Ketergantungan pada subsidi dari pemerintah dalam hal finansial perlu diawasi untuk memastikan dana yang cukup tersedia setiap tahunnya. Dari sisi sumber daya manusia, kekurangan penyuluh pertanian dan pelatihan bagi petugas administrasi perlu menjadi fokus utama untuk meningkatkan kinerja program. Infrastruktur juga memerlukan peningkatan, terutama dalam hal penyediaan akses teknologi bagi petani di daerah terpencil, agar mereka dapat lebih mudah mengakses informasi dan prosedur klaim.

Ketersediaan sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, pengelolaan sumber daya ini harus diperhatikan secara berkesinambungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur digital serta penataan kembali alokasi dana subsidi premi menjadi hal yang penting untuk mendukung kesuksesan program ini. Dengan dukungan yang tepat dari semua aspek sumber daya, diharapkan Program AUTP dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani di Kecamatan Junjung Sirih.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syafril (2024) bahwa sumberdaya manusia termasuk kepada faktor pendukung implementasi program SNSE, yaitu dapat dilihat dari adanya kerjasama dan kegigihan masyarakat di suatu nagari pelaksana program. Namun dari segi sumber daya non manusia masih belum maksimal. Selain itu, sumberdaya non manusia dalam hal ini anggaran merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan sebuah implementasi program SNSE.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Aspek komunikasi antar organisasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Program ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, dan penyedia asuransi. Koordinasi yang baik di antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan kebijakan dasar dan pembiayaan subsidi untuk premi asuransi petani. Di sisi lain, pemerintah daerah,

khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Solok, bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, termasuk penyaluran subsidi, pendataan petani, dan pendampingan kepada petani.

Koordinasi antara kedua pihak ini sangat krusial untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Pemerintah pusat menetapkan aturan yang harus diikuti, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar alokasi subsidi tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah petani yang terdaftar di program. Sebagai contoh, Dinas Pertanian Kabupaten Solok perlu secara rutin melaporkan jumlah petani yang terdaftar dan memastikan anggaran subsidi yang disalurkan mencukupi kebutuhan di lapangan.

b. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Tani

Kelompok tani di Kecamatan Junjung Sirih menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Program AUTP, karena mereka bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan petani. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, dengan kelompok tani akan memastikan bahwa informasi tentang program dapat diteruskan dengan jelas kepada petani. Kelompok tani juga berperan penting dalam proses pendaftaran petani, verifikasi data, dan penyampaian keluhan atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam pelaksanaan program. Namun, tantangan yang sering muncul adalah adanya perbedaan pemahaman antara kelompok tani dan pemerintah daerah mengenai prosedur dan manfaat program. Oleh karena itu, sosialisasi yang rutin dan pelatihan bagi pengurus kelompok tani tentang detail program sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara keduanya.

c. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Asuransi

Penyedia asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan klaim asuransi dan pembayaran ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus menjaga komunikasi yang baik dengan penyedia asuransi untuk memastikan bahwa prosedur klaim berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian Kabupaten Solok dengan pihak penyedia asuransi akan mempermudah proses verifikasi klaim dan memastikan bahwa petani menerima pembayaran klaim tepat waktu.

Selain itu, penyedia asuransi juga perlu memberikan pelatihan atau informasi kepada petani mengenai cara mengajukan klaim dan dokumentasi yang diperlukan. Dengan adanya koordinasi yang intensif, dapat mengurangi kesalahan atau keterlambatan dalam proses klaim yang sering kali menjadi hambatan bagi petani untuk mendapatkan manfaat dari program asuransi.

d. Koordinasi antara Kelompok Tani dan Penyedia Asuransi

Selain komunikasi yang melibatkan pemerintah, hubungan langsung antara kelompok tani dan penyedia asuransi juga sangat penting. Kelompok tani menjadi perwakilan petani dalam menyampaikan keluhan, memastikan proses pendaftaran berjalan dengan baik, serta menyampaikan klaim asuransi yang diperlukan. Penyedia asuransi harus bekerja sama dengan kelompok tani untuk mendampingi petani selama proses klaim, terutama dalam verifikasi kerugian yang dialami.

Keterlibatan kelompok tani dalam komunikasi ini memudahkan penyedia asuransi dalam mengumpulkan data yang akurat terkait kerusakan yang terjadi pada lahan pertanian, yang kemudian menjadi dasar dalam proses klaim. Oleh karena itu, penyedia asuransi perlu memiliki saluran komunikasi yang terbuka dan mudah diakses oleh kelompok tani agar permasalahan yang muncul dapat segera diatasi.

Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, dan penyedia asuransi sangat diperlukan dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Setiap pihak memiliki peran yang saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan program. Meskipun sudah ada upaya koordinasi yang baik, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan pemahaman masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas pada masing-masing pihak yang terlibat menjadi hal yang penting untuk memastikan

program ini berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi petani di Kecamatan Junjung Sirih.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Rizki Syafril bahwa koordinasi menjadi sangat penting dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh Pemerintah salah satu implementasi Anisa, E., & Syafril, R. Government Strategy in Overcoming Structural Poverty in the South Coast. bahwa implementasi peraturan tersebut belum optimal karena kurangnya koordinasi dengan koordinasi dengan tanpa melibatkan remaja usia nikah, keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang terbatas, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kursus pra nikah.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Aspek karakteristik badan pelaksana dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, melibatkan peran penting dari institusi lokal seperti Dinas Pertanian Kabupaten Solok dan kelompok tani. Kapasitas institusi-institusi ini sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi program, mengingat keduanya bertindak sebagai ujung tombak dalam mengelola program asuransi untuk petani.

Dinas Pertanian Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam koordinasi dan pengelolaan program AUTP di tingkat daerah. Institusi ini bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal, melakukan sosialisasi kepada petani, serta mengelola administrasi terkait program asuransi. Namun, kapasitas Dinas Pertanian dalam hal sumber daya manusia dan anggaran menjadi salah satu tantangan. Di satu sisi, dinas ini memiliki sejumlah petugas yang bertugas untuk memantau pelaksanaan program, namun jumlahnya masih terbatas untuk menjangkau seluruh petani di Kecamatan Junjung Sirih yang cukup luas.

Selain itu, tantangan lain adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang intensif di lapangan. Dinas Pertanian juga harus memastikan bahwa proses administrasi, seperti pendaftaran petani, pengumpulan data, dan verifikasi klaim asuransi, berjalan lancar. Untuk itu, peningkatan kapasitas teknis dan administratif bagi petugas di Dinas Pertanian sangat dibutuhkan, agar mereka dapat mengelola program ini dengan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya kelompok tani merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi Program AUTP di Kecamatan Junjung Sirih. Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan petani, menyampaikan informasi mengenai manfaat program, serta mendampingi petani dalam proses pendaftaran dan klaim. Kelompok tani memiliki peran yang vital dalam memastikan bahwa petani yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam program ini. Namun, kapasitas kelompok tani sering kali terbatas dalam hal pengetahuan teknis dan manajerial. Banyak pengurus kelompok tani yang belum sepenuhnya memahami tata cara administrasi yang terkait dengan program asuransi, sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam memastikan proses berjalan dengan baik.

Selain itu, kelompok tani juga berperan dalam membantu petani dalam proses klaim asuransi. Ketika petani mengalami kerugian akibat gagal panen, kelompok tani menjadi perantara dalam proses verifikasi kerugian dan pengajuan klaim. Oleh karena itu, kelompok tani perlu dilibatkan dalam pelatihan khusus mengenai prosedur klaim dan pengelolaan data pertanian yang berkaitan dengan program ini.

Dengan demikian, kapasitas badan pelaksana, baik Dinas Pertanian Kabupaten Solok maupun kelompok tani, memiliki peran yang sangat krusial dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih. Meskipun kedua institusi ini sudah berfungsi dengan baik, tantangan dalam hal sumber daya manusia, pengetahuan teknis, serta infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Untuk itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penambahan sumber daya, dan pengembangan sistem informasi yang lebih baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani di Kecamatan Junjung Sirih.

5. Kondisi Lingkungan Eksternal

Aspek kondisi lingkungan eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat akan memengaruhi tingkat adopsi dan pemahaman petani terhadap pentingnya program asuransi.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal ini dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan asuransi di tingkat lokal.

1) Faktor Sosial: Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Petani

Salah satu faktor sosial yang sangat mempengaruhi implementasi program asuransi adalah tingkat kesadaran petani terhadap manfaat asuransi. Di Kecamatan Junjung Sirih, banyak petani yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang pentingnya asuransi usaha tani, terutama dalam melindungi mereka dari risiko gagal panen akibat faktor alam, serangan hama, atau bencana alam. Hal ini dapat menghambat tingkat partisipasi petani dalam program AUTP. Sebagian petani mungkin merasa ragu untuk mengikuti program ini karena mereka tidak memahami mekanisme dan manfaat yang ditawarkan oleh asuransi.

Meskipun pemerintah daerah dan kelompok tani telah melakukan sosialisasi, namun masih ada petani yang menganggap bahwa biaya premi yang harus dibayar tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Untuk itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman petani melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan. Melibatkan petani yang sudah merasakan manfaat program ini sebagai duta atau agen perubahan di lapangan dapat menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan program kepada petani lainnya.

2) Faktor Ekonomi: Kemampuan Finansial Petani dan Subsidi Premi

Faktor ekonomi menjadi salah satu aspek eksternal yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP. Di Kecamatan Junjung Sirih, sebagian besar petani tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Mereka bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama pendapatan dan sering kali menghadapi kendala finansial, terutama dalam musim tanam yang buruk atau saat harga komoditas pertanian turun.

Kemampuan finansial petani yang terbatas sering menjadi alasan utama mengapa mereka enggan untuk mendaftar dalam program asuransi. Biaya premi yang harus dibayar, meskipun disubsidi oleh pemerintah, tetap dianggap sebagai beban tambahan bagi petani. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi premi yang diberikan mencakup sebagian besar biaya yang diperlukan, agar petani merasa terbantu dan tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti fluktuasi harga komoditas pertanian atau harga input pertanian yang tinggi, dapat memengaruhi keputusan petani untuk mengikuti program asuransi.

Dalam situasi ini, kesadaran petani akan pentingnya melindungi usaha tani mereka dari risiko gagal panen menjadi sangat relevan, meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pemerintah dan pihak penyedia asuransi perlu mencari solusi agar biaya premi tidak menjadi beban berat bagi petani, misalnya dengan meningkatkan subsidi atau memberikan fleksibilitas dalam pembayaran premi.

3) Faktor Budaya: Tradisi dan Pola Pikir Petani Terhadap Risiko

Faktor budaya juga sangat memengaruhi implementasi Program AUTP. Banyak petani di Kecamatan Junjung Sirih yang masih memegang teguh tradisi lama dalam mengelola pertanian. Beberapa petani memiliki pandangan bahwa mereka lebih mengandalkan takdir atau pengalaman turun-temurun dalam mengatasi masalah pertanian, seperti kerugian akibat bencana alam atau serangan hama, daripada bergantung pada program asuransi.

Budaya ini bisa menyebabkan petani merasa skeptis terhadap manfaat asuransi. Mereka lebih memilih untuk mengatasi masalah pertanian secara mandiri, meskipun cara ini seringkali kurang efektif dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan penyedia asuransi untuk merancang pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya petani. Misalnya, sosialisasi program asuransi bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih berbasis pada pengalaman nyata petani lain yang sudah merasakan manfaat asuransi. Dengan

melibatkan tokoh masyarakat atau petani yang dihormati, dapat membantu membangun kepercayaan terhadap program asuransi.

6. Disposisi Para Pelaksana

Aspek disposisi para pelaksana kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Disposisi di sini mencakup komitmen, sikap, dan pemahaman dari para pelaksana kebijakan baik itu pemerintah daerah, petugas Dinas Pertanian, kelompok tani, maupun penyedia asuransi yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan program. Ketiga elemen ini menentukan apakah kebijakan dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan secara efektif di lapangan.

1) Komitmen Para Pelaksana Program

Komitmen para pelaksana, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelompok tani, sangat penting untuk memastikan bahwa program AUTP berjalan dengan lancar. Komitmen ini mencakup tanggung jawab para pelaksana dalam memastikan bahwa petani dapat mengakses dan memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanian, berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, sementara kelompok tani berkomitmen untuk memastikan anggota mereka terdaftar dan mendapatkan manfaat dari program asuransi.

Namun, meskipun ada komitmen, kadang-kadang keterbatasan sumber daya seperti dana, jumlah tenaga pendamping, dan waktu seringkali mengurangi efektivitas pelaksanaan. Terlepas dari hal tersebut, komitmen yang kuat dari pelaksana di lapangan seringkali menjadi penentu kesuksesan program. Oleh karena itu, adanya dukungan dari semua pihak termasuk penyedia asuransi dan pemerintah pusat untuk menjaga semangat dan komitmen pelaksana sangat dibutuhkan.

2) Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana terhadap program AUTP juga sangat memengaruhi implementasi kebijakan ini. Dalam hal ini, sikap para petugas Dinas Pertanian, pengurus kelompok tani, dan petani sendiri harus memiliki pemahaman yang positif dan proaktif terhadap pentingnya program asuransi. Jika para pelaksana memiliki sikap yang enggan atau pesimistis terhadap keberhasilan program, hal ini dapat memengaruhi keberhasilan implementasi di lapangan.

Sikap yang positif dari para pelaksana akan sangat mendukung kelancaran sosialisasi kepada petani. Sebaliknya, jika para pelaksana kurang menunjukkan sikap antusias atau bahkan skeptis terhadap program, hal ini dapat mengurangi kepercayaan petani terhadap manfaat yang diberikan oleh asuransi. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan yang tepat sangat penting untuk menumbuhkan sikap positif di kalangan pelaksana, khususnya terkait dengan manfaat jangka panjang yang dapat diberikan oleh program asuransi bagi para petani.

3) Pemahaman Para Pelaksana

Pemahaman tentang kebijakan AUTP dan mekanismenya oleh para pelaksana menjadi faktor kunci dalam suksesnya implementasi program ini. Para petugas Dinas Pertanian dan kelompok tani yang terlibat dalam program harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prosedur pendaftaran, verifikasi klaim, serta mekanisme ganti rugi dalam asuransi. Tanpa pemahaman yang mendalam, para pelaksana bisa saja kesulitan dalam memberikan informasi yang akurat kepada petani, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi petani dalam program.

Bagi kelompok tani, pemahaman ini juga mencakup pentingnya melindungi usaha tani mereka dari risiko alam dan faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan kerugian besar. Jika kelompok tani memahami bagaimana program ini dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap usaha mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk menyosialisasikan dan mendorong anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam program.

Bagi penyedia asuransi, pemahaman mengenai kondisi lokal dan kebutuhan petani di Kecamatan Junjung Sirih sangat diperlukan untuk memberikan layanan yang sesuai dan responsif terhadap klaim yang diajukan. Penyedia asuransi harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan petani dan badan pelaksana lokal untuk memastikan kelancaran administrasi.

Meskipun komitmen dan sikap positif sangat diperlukan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana dalam mendukung implementasi program AUTP di Kecamatan Junjung Sirih. Salah satunya adalah keterbatasan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman para pelaksana. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, para petugas dan pengurus kelompok tani mungkin tidak akan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik.

PENUTUP

Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan perlindungan terhadap petani, terutama dalam mengurangi risiko kerugian akibat bencana alam, serangan hama, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil pertanian. Namun, keberhasilan pelaksanaan program ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari aspek kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, disposisi para pelaksana, maupun kondisi lingkungan eksternal.

1. Kejelasan Tujuan dan Standar Kebijakan: Tujuan program AUTP di Kecamatan Junjung Sirih cukup jelas, yaitu memberikan perlindungan terhadap usaha tani padi agar petani tidak kehilangan penghasilan akibat kegagalan panen. Namun, ada tantangan dalam memastikan kejelasan dan kesepakatan tentang standar yang ditetapkan, terutama mengenai target cakupan petani dan mekanisme subsidi premi.
2. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Terbatasnya sumber daya dalam hal personel yang terlatih dan anggaran yang mencukupi untuk subsidi premi menjadi kendala yang dihadapi.
3. Komunikasi Antar Organisasi: Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, kelompok tani, dan penyedia asuransi menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Walaupun ada upaya untuk membangun komunikasi, terkadang terdapat hambatan yang menyebabkan ketidaksepehaman antar pihak pelaksana yang berisiko mengganggu kelancaran pelaksanaan.
4. Disposisi Para Pelaksana: Komitmen, sikap, dan pemahaman para pelaksana termasuk pemerintah daerah, kelompok tani, dan penyedia asuransi menjadi faktor yang sangat penting. Sikap positif dan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya asuransi bagi petani sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat.
5. Kondisi Lingkungan Eksternal: Faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat turut mempengaruhi penerimaan petani terhadap program ini. Tingkat kesadaran petani mengenai manfaat asuransi, kemampuan finansial untuk membayar premi, serta pandangan budaya yang mengedepankan pengalaman lokal sering menjadi hambatan yang harus dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab solichin, 1997, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Anisa, E., & Syafril, R. Government Strategy in Overcoming Structural Poverty in the South Coast. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 15(1), 164-173.
- Delly Maulana, 2019, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, Banten: CV AA. Rizky
- Dunn, William N, 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Edwards III, 1980, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc
- Fermana, S, 2009, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Gitosaputro, S., Nurmayasari, I., & Rangga, K. K. (2023). Persepsi Petani Terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 335–345. <https://doi.org/10.25015/19202345426>
- Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press
- Hifni, M. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Hukum Pidana Islam*, 6(1). <http://journal.uiad.ac.id/index.php/AI-Ahkam/index>
- Intan Fitri Meutia, 2017, *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: Cv Anugrah Utama Raharja
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2022. Kepmentan Nomor: 1/Kpts/SR.210/B/01/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
- Nuraini, R. E., & Prathama, A. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 401–412.
- Oktavia, Yenny, and Zednita Azriani, 'Analisis Komunikasi Program Asuransi Usaha Tani Padi Dan Persepsi Petani Di Kabupaten Solok', *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2.2 (2020), pp. 176–85, doi:10.25077/joseta.v2i2.240
- Pasaribu, M. H. (2021). *Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program*. 2(1), 38–46.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2022. Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Rahmadya Aydini, Rizki Syafril. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* Vol.12 No.1 Tahun 2024
- Sari, P., Arifin, J., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., Kompleks, T., Olahraga, S., Kawa, S., Tanjung, P., & Selatan, T. K. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai*. 4(1), 426–440.
- Septiawan, C., & Sujana, E. (2022). *Pengembangan Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Di Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Di Universitas Indonesia Maju)*. 1(12), 2119–2126.
- Siregar, N. (2022). *Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)*. 1(7), 713–722
- I,Fadhilah.,& R,Syafril.(2025). IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K) DI KABUPATEN TANAH DATAR OLEH DINAS PERTANIAN. *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol.8, No. 1 (Januari 2025) Hal.278-289.